

**Habitiasi Masyarakat Miskin Dalam Penerapan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Desa Jengglunharjo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung**

**Rizma Ayu Kusuma Wardani**

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[rizmawardani16040564092@mhs.unesa.ac.id](mailto:rizmawardani16040564092@mhs.unesa.ac.id)

**Pambudi Handoyo**

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[pambudihandoyo@unesa.ac.id](mailto:pambudihandoyo@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Penerapan suatu program dari pemerintah merupakan suatu hal yang akan memunculkan habitus dalam suatu masyarakat. Habitus yang ada dalam lingkungan masyarakat akan terus dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu akan mencatat masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan yang ada di desa. Masyarakat miskin yang tercatat akan diusulkan ke pusat. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana habituasi masyarakat miskin dalam penerapan Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Desa Jengglunharjo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung. Teori yang digunakan menggunakan perspektif Bourdieu mengenai Habitus. Data yang diambil dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil yang didapatkan bahwa adanya program ini membuat masyarakat terlena dengan bantuan yang diterima dari pemerintah. Habitus masyarakat miskin dengan adanya program ini akan senantiasa mendapatkan bantuan secara terus menerus. Namun ketika adanya perubahan hidup dalam masyarakat miskin, maka masyarakat tersebut tidak lagi diusulkan sebagai penerima beantuan. Namun masih banyak masyarakat yang tergolong mampu masih membutuhkan bantuan. Mereka menganggap bahwa mereka juga layak menerima bantuan supaya diberikan secara rata. Habitus masyarakat ini muncul karena mereka tidak mau untuk mengurus mengenai bantuan yang diinginkan. Terkadang masyarakat yang dianggap mampu juga masih membutuhkan bantuan karena bisa jadi masyarakat tersebut sudah tidak mampu seperti dahulu. Masyarakat tersebut hanya mau menerima ketika diberi bantuan tetapi tidak mau untuk menjelaskan kepada pihak terkait yang ada di desa.

**Kata kunci** : Masyarakat Miskin, Habitiasi, Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu

**Abstract**

Implementation of a program from the government is something that will bring up habitus in a society. Habitus in the community will continue to be carried out for quite a long time. The Referral and Integrated Services System Program will record the poor who need help in the village. The recorded poor people will be proposed to the center. This research will discuss about how the habituation of the poor in implementing the Integrated Referral Service System Program in Jengglunharjo Village, Tanggunggunung District, Tulungagung Regency. The theory used uses Bourdieu's perspective on Habituation. Data taken using interview and observation techniques. The results obtained that the existence of this program makes people complacent with the help received from the government. Habitus of the poor with this program will always get help continuously. However, when there is a change in life in poor communities, the community is no longer proposed as a recipient of assistance. But there are still many people who are classified as able to still need help. They assume that they are also worthy of assistance to be given equally. This community habitus arose because they did not want to take care of the desired assistance. Sometimes people who are considered

capable also still need help because it may be that the community is not as capable as before. The community is only willing to accept when given assistance but does not want to explain to relevant parties in the village.

**Keywords** : Poor Society, Habituation, The Integrated Referral Service System Program

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang seringkali dihadapi oleh masyarakat. Kemiskinan telah terjadi di berbagai negara seperti negara maju dan berkembang. Kemiskinan dapat juga diartikan sebagai berkurangnya kemampuan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta semakin sulit untuk memperoleh kehidupan yang layak. Masyarakat yang hidup dalam keadaan kurang akan sulit untuk mendapatkan akses yang dibutuhkan (Muhtar, 2017). Masyarakat yang hidup dalam keadaan kekurangan disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut karena pendidikan yang rendah dan sedikitnya pengetahuan yang dimiliki. Sehingga dalam hal ini akan membuat masyarakat semakin hidup dalam keadaan yang miskin. Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang berada dalam kondisi ekonomi, sosial dan budaya yang tidak menguntungkan sehingga kehidupan yang dijalankan tidak makmur dan belum sejahtera (Sadewo *et al.*, 2007). Masalah kemiskinan terus menjadi hal yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang serius sehingga harus ada tindakan yang serius. Banyak masyarakat di Indonesia yang masih hidup dalam keadaan miskin. Keadaan yang memungkinkan mereka untuk sulit memperoleh akses untuk bisa memenuhi hidupnya. Akses yang dibutuhkan masyarakat miskin seperti pendidikan, kesehatan serta pekerjaan. Hal tersebut untuk menunjang hidup masyarakat miskin. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat miskin yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Upaya dari pemerintah terus dilakukan untuk mengurangi masalah kemiskinan di Indonesia (Marleni, 2012). Namun hasilnya masih saja banyak ditemui masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan. Program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah belum berjalan dengan lancar. Program yang seharusnya dapat membantu masyarakat miskin justru terkadang masih saja tidak tepat. Program bantuan yang dikeluarkan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat miskin yang

membutuhkan. Masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan tersebut nyatanya masih hidup dalam kekurangan. Bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah masih saja belum diberikan secara tepat kepada masyarakat miskin. Masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan justru terlewatkan. Pemerintah belum cukup memberikan cara untuk mengatasi masalah kemiskinan yang masih banyak terjadi. Munculnya bantuan-bantuan yang diberikan juga pasti memunculkan pro dan kontra antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan upaya semaksimal mungkin. Adanya berbagai program dari pemerintah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan akan memudahkan untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Data dalam Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin Di Indonesia adalah 25,14 juta jiwa pada bulan Maret 2019. Jika dibandingkan dengan bulan September 2018 maka terlihat adanya penurunan sebesar 0,25%. Untuk bulan September 2019 terdapat 24,79 juta jiwa penduduk miskin. Dari hasil data Badan Pusat Statistik untuk wilayah Jawa Timur pada bulan Maret 2019 terdapat jumlah penduduk miskin sebesar 4.112,25 ribu jiwa atau 10,37%. Sedangkan untuk data

jumlah penduduk miskin di wilayah Tulungagung yang dilihat melalui Badan Pusat Statistik sebesar 75,23 ribu jiwa atau setara dengan 7,27% (Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan jumlah data BPS dapat terlihat bahwa terdapat penurunan jumlah masyarakat miskin. Dari bulan Maret 2016 sampai September 2019 terdapat penurunan sebesar 1,86% (Badan Pusat Statistik, 2020). Program untuk mengurangi masalah kemiskinan dikatakan belum cukup efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan. Banyak kota atau daerah yang masih banyak terdapat masyarakat miskin. Pada tahun 2016 pemerintah membentuk sebuah program yang dapat mengawasi pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. Program tersebut bernama Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Selain sebagai pengawas, program tersebut juga akan mencari tahu keluhan yang dimiliki masyarakat miskin dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimiliki (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016).

Tabel 1 Jumlah Data Yang Diusulkan ke Pusat per Desember 2019

Bulan	KIS	PKH	BPNT
Juli	1500	268	296
Agustus	1520	268	296
September	1520	268	296
Oktober	1520	268	296

November	1520	268	296
Desember	1520	286	392

Sumber : Laporan SLRT 2019

Berdasarkan hasil pencatatan yang dilakukan oleh fasilitator sebagai perantara dari Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Desa Jengglunharjo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung bahwa jumlah data yang diusulkan hanya ada penambahan jumlah PKH dan BPNT pada bulan Desember 2019. Akhir Desember adalah jumlah terakhir yang akan dikumpulkan ke sekretariat SLRT.

Tujuan dibentuknya program SLRT yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan supaya bantuan yang diterima masyarakat diberikan secara tepat sasaran. Program SLRT akan menjadi pengawas bagi program lainnya untuk mencatat masyarakat yang benar-benar membutuhkan (Sa'idah and Prabawati, 2019). Adanya SLRT juga akan membantu masyarakat miskin untuk menerima rujukan ketika mengalami sakit. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu merupakan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos). Melalui program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan. Program ini akan berupaya untuk membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin serta membantu untuk

mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016). Program SLRT mulai terbentuk pada tahun 2016 dengan kota yang telah menjalankan sebanyak 50 kota. Tahun ke tahun jumlah kota yang menyelenggarakan Program SLRT selalu bertambah. Sampai sekarang jumlah kota yang telah menjalankan program tersebut sebanyak 150 kota di Indonesia (Desi Purnamawati, 2020). Adanya program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi saat ini. Upaya dari pemerintah ini terus dilakukan dengan membentuk program-program yang dapat mengurangi masalah kemiskinan. Diharapkan dari tahun ke tahun angka kemiskinan dapat berkurang dengan adanya program-program yang telah dibentuk pemerintah tersebut. Salah satu kabupaten yang telah menjalankan Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu adalah Tulungagung. Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Jawa Timur. Kabupaten Tulungagung memiliki jumlah penduduk yang terbilang cukup banyak. Selain itu, di kabupaten Tulungagung juga masih banyak terdapat penduduk miskin.

Masalah kemiskinan masih menjadi problem yang belum bisa dihilangkan. Terlihat kemiskinan yang

terjadi selalu ada dan hanya menurun sedikit dari tahun ke tahun. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang telah menjalankan program SLRT dari Kementerian Sosial sejak tahun 2016. Program SLRT ini akan membantu masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dihadapi. Masalah tersebut seperti penerimaan bantuan yang tidak tepat sasaran, pemberian kartu yang belum sesuai, memberikan rujukan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan menerima keluhan dari masyarakat miskin (Muhtar, 2017). Program SLRT akan menjangkau setiap desa yang berada di Kabupaten Tulungagung. Salah satu desa yang dijangkau adalah desa Jengglunharjo, Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung. Desa Jengglunharjo memiliki jumlah penduduk 5278 ribu jiwa terbagi atas 2680 laki-laki dan 2598 perempuan. Untuk jumlah yang diusulkan dalam program SLRT per Desember 2019 sebanyak 2705 jiwa. Jumlah yang diusulkan tersebut ada yang memerlukan KIS, KIP ataupun BPNT. Desa Jengglunharjo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pegunungan. Desa Jengglunharjo terletak dekat dengan wilayah pantai. Akses untuk menuju desa tersebut cukup sulit. Jarak dari RT ke RT lainnya juga terbilang cukup jauh serta jalan yang harus dilalui cukup sulit.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara etnometodologi. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perspektif teori Habitus dari Pierre Bourdieu. Penelitian kualitatif dilakukan dengan penelitian secara obyektif tentang fenomena yang terjadi (Suyanto and Sutinah, 2004). Habitus dari Bourdieu menjelaskan tentang suatu sistem disposisi yang berlangsung lama serta memiliki fungsi sebagai basis generatif yang terstruktur (Harker, 2005). Teori dari Bourdieu ini digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan dan gaya hidup yang dimiliki setiap individu. Habitus menurut Bourdieu akan dijalankan pada sebuah ranah. Ranah digunakan untuk meningkatkan posisi individu dalam suatu masyarakat. Posisi tersebut nantinya akan ditentukan oleh modal yang dimiliki. Sehingga Bourdieu akan menjelaskan tentang habitus, modal, ranah dan praktik.

Lokasi penelitian yang dilakukan dilakukan di Desa Jengglunharjo yang berada di Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung. Peneliti memilih lokasi tersebut karena desa tersebut merupakan salah satu desa yang dipilih dalam Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan wilayahnya cukup jauh dari perkotaan karena masuk ke dalam wilayah pegunungan. Jumlah masyarakat miskin

yang ada di desa tersebut terbilang cukup banyak dan jumlah yang diusulkan terbilang cukup banyak dari jumlah masyarakat. Subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat dan anggota dari SLRT yang ada di Tulungagung. Subjek yang diambil ditentukan dengan cara purposive sampling. Masyarakat yang dijadikan subjek dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria tersebut merupakan masyarakat miskin sesuai data Badan Pusat Statistik. Selain itu kriteria yang dipilih adalah masyarakat yang mampu tetapi membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Selain itu peneliti juga memilih beberapa anggota dari Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk menambah data tentang penerapan program tersebut di masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi dan wawancara secara mendalam kepada subjek. Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada subjek yang telah ditentukan kriterianya. Subjek yang memenuhi kriteria akan langsung di wawancara oleh peneliti untuk memperoleh informasi sesuai fokus penelitian yang dicari. Kriteria yang dipilih yaitu masyarakat miskin yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah, masyarakat miskin yang belum

mendapatkan bantuan dari pemerintah serta masyarakat yang telah mampu tetapi masih membutuhkan bantuan. Masyarakat miskin yang dimaksud yaitu masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan rendah, seorang perempuan yang menghidupi keluarganya sendiri, dan masyarakat yang masih tinggal di rumah berlantai tanah atau semen (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016). Adanya kriteria tersebut diharapkan mampu untuk memperoleh data yang dicari. Masyarakat mampu dalam hal ini yaitu sudah memiliki rumah yang beralaskan keramik dan memiliki pendapatan diatas rata-rata.

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari Bourdie tentang Habitus Masyarakat Miskin Dalam Program Sistem Layanan Rujukan dan Terpadu. Adapun konsep yang dibahas antara lain Masyarakat Miskin, Program Sistem Layanan Rujukan dan Terpadu, Habitus Masyarakat Miskin

#### **Masyarakat Miskin**

Masyarakat miskin merupakan seseorang yang berada dalam kehidupan yang tidak layak. Masyarakat dikatakan miskin apabila tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang dimaksud seperti sandang, pangan dan papan. Masyarakat yang hidup dalam keadaan miskin akan sulit untuk memperoleh akses yang dibutuhkan untuk

kehidupannya (Djafar and Sune, 2019). Akses tersebut seperti, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan lingkungan sekitar. Masyarakat miskin akan senantiasa hidup dalam keadaan kurang. Faktor yang menyebabkan masyarakat hidup dalam keadaan miskin seperti tidak memiliki pekerjaan, hidup dalam lingkup keluarga miskin sejak kecil, tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Selain itu sering terjadi kesenjangan dalam hal perekonomian atau tingkat kemiskinan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah (Khomsan *et al.*, 2015).

Chambers menjelaskan bahwa kemiskinan adalah konsep-konsep yang terdiri dari beberapa dimensi. Dimensi yang dimaksud seperti kemiskinan itu sendiri, ketergantungan, ketidakberdayaan, kerentanan dan keterasingan (Chambers, 1983). Dimensi-dimensi tersebut saling berkaitan. Dimensi pertama yaitu kemiskinan itu sendiri maksudnya bahwa seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang diakibatkan karena kepemilikan pendapatan yang rendah. Kedua yaitu ketergantungan dimana individu tersebut memiliki pendapatan yang rendah sehingga menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Ketiga yaitu ketidakberdayaan yang berarti bahwa individu tersebut memiliki kemampuan yang rendah sehingga sulit untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Keempat yaitu kerentanan dimana seseorang tidak mampu untuk menghadapi situasi yang dialami seperti situasi darurat yang datang secara tiba-tiba. Kelima yaitu keterasingan yang berarti seseorang tersebut berada dalam tempat tinggal yang masih terpencil dan sulit dijangkau.

Masyarakat miskin merupakan kumpulan individu yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memiliki peluang dalam meningkatkan taraf hidupnya (Suryawati, 2005). Masyarakat yang dikatakan miskin akan sulit untuk memperbaiki kehidupannya karena tidak memiliki akses yang cukup. Kemiskinan muncul diakibatkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai. Pendidikan yang dimiliki juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat masih hidup dalam keadaan miskin. Faktor tempat tinggal juga mempengaruhi masyarakat menjadi miskin. Masyarakat yang tinggal pada suatu daerah yang terpencil dan masih sulit dijangkau akan sulit untuk meningkatkan kehidupannya. Seperti dimensi yang telah dijelaskan oleh Chambers mengenai penentuan lokasi tempat tinggal yang menjadi faktor kemiskinan (Chambers, 1983). Masyarakat miskin dalam kehidupannya akan sulit memperoleh sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hal

tersebut karena ketidakmampuan untuk mendapatkan dan memiliki sesuatu yang diinginkan. Masyarakat dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik apabila ada kemauan dan bantuan yang diterima. Jika masyarakat tersebut memiliki kemampuan dan semangat untuk berubah maka masyarakat tersebut bisa meningkatkan kehidupan yang dimiliki menjadi lebih baik. Selain itu masyarakat miskin juga akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun masyarakat miskin tersebut tidak boleh hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja. Masyarakat miskin tersebut juga harus memiliki keinginan untuk mau bekerja keras.

### **Habitasi Masyarakat Miskin**

Habitus merupakan struktur kognitif yang digunakan untuk menghadapi berbagai kehidupan sosial. Habitus telah tercipta melalui sebuah proses yang berlangsung lama. Terdapat sebuah sistem disposisi yang telah bertahan lama dan tidak dapat berubah. Struktur yang berada didalamnya akan menjadi sebuah proses penstrukturan. Disposisi yang dimaksud Bourdieu mengenai kesiapan dari setiap individu dalam merespon terjadinya sesuatu (Harker, 2005). Habitus yang dimaksud oleh Bourdieu akan menjelaskan tentang adanya kebiasaan maupun gaya hidup yang dimiliki oleh individu di dalam suatu masyarakat. Konsep Habitus yang dimiliki oleh

Bourdieu memahami mengenai kemampuan yang aktif dan kreatif dalam hal menciptakan sesuatu. Bourdieu juga melihat habitus meliputi sebuah disposisi-disposisi (Siregar, 2016). Disposisi tersebut terdiri dari bertahan lama dalam waktu tertentu, bisa dialih pindahkan yang berarti mampu menciptakan praktik-praktik baru, struktur yang distrukturkan mengenai kondisi obyektif dan struktur yang menstruktur yang menciptakan praktik sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Habitus dibentuk dengan cara yaitu orang-orang menempati posisi secara dominan dalam suatu kelas yang dominan, sebenarnya harus diletakkan pada situasi yang akan mendorong mereka untuk bisa mempertahankan hubungan yang ambivalen dengan benda budaya dan orang yang memproduksi (Harker, 2005).

Habitus menurut Bourdieu akan dijalankan di sebuah ranah. Ranah dalam hal ini bisa dikatakan sebagai arena dalam suatu masyarakat. Ranah merupakan sebuah tempat saling bersaing bagi para aktor sosial (Siregar, 2016). Aktor sosial dalam hal ini adalah para masyarakat yang berada dalam lingkungannya. Aktor sosial akan senantiasa bersaing untuk memperoleh kekuatan simbolis dan berbagai sumber. Jika kekuatan dan sumber yang dimiliki semakin banyak, maka struktur yang dimiliki akan semakin tinggi pula. Kata lain bahwa ranah



didefinisikan sebagai wilayah yang mengarahkan untuk memiliki strategi dalam meningkatkan posisi atau kedudukan di masyarakat (Ritzer and Douglas J. Goodman, 2008). Ranah tidak akan dapat dipisahkan dari suatu lingkungan yang didalamnya terdapat individu.

Bourdieu juga menjelaskan tentang modal. Modal berkaitan dengan habitus dan ranah. Modal yang dimaksud seperti modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik (Harker, 2005). Modal tersebut yang akan digunakan untuk mempertahankan suatu dominasi. Modal ekonomi berkaitan dengan pendapatan dan barang-barang yang digunakan untuk tujuan tertentu. Modal budaya terdiri dari pengetahuan. Modal sosial meliputi hubungan yang terjalin di antara individu. Modal simbolik meliputi kehormatan dan prestise yang dimiliki oleh seorang individu di dalam lingkungannya.

Suatu praktik sosial dalam kehidupan pastinya tidak terlepas dari adanya sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap harinya. Adanya sebuah habitus ini yang merupakan tradisi yang sering dilakukan oleh individu pada umumnya. Habitus juga dapat menciptakan praktek baru dalam lingkungannya yang akan terjadi dalam waktu yang lama. Seperti halnya pada masyarakat miskin yang

mendapatkan bantuan sosial. Masyarakat miskin tersebut telah menciptakan praktek baru dalam kehidupannya. Praktek baru yang dimaksud yaitu tentang penerimaan bantuan sosial yang akan terus diterima dalam jangka waktu yang lama (Darwis and Nurmanaf, 2001). Unsur-unsur yang telah dijelaskan merupakan teori yang telah dijelaskan oleh Bourdieu. Hal tersebut akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam membahas penelitian ini. Penelitian yang dilakukan ini fokus kepada kebiasaan masyarakat miskin dalam penerapan adanya Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu dari pemerintah.

### **Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sebagai Upaya Mengatasi Masalah Kemiskinan**

Masyarakat miskin merupakan seseorang yang berada dalam keadaan kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak bekerja karena memiliki kemampuan yang rendah. Seperti yang dijelaskan Chambers bahwa kemiskinan terdiri dari beberapa dimensi. Dimensi tersebut antara lain kemiskinan itu sendiri, ketidakberdayaan, kerentanan, ketergantungan dan keterasingan (Chambers, 1983). Masyarakat yang berada dalam keadaan miskin sulit mendapatkan akses yang dibutuhkan. Selain itu, masyarakat yang tinggal di

daerah terpencil serta sulit dijangkau akan memungkinkan munculnya masyarakat miskin baru. Masyarakat akan semakin sulit untuk mencari pekerjaan karena sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat akan sulit mendapatkan pendapatan. Rendahnya pendapatan juga diartikan sebagai terbatasnya seseorang dalam mengkonsumsi dan memenuhi kebutuhan hidupnya (Girsang, 2011).

Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi masyarakat miskin. Upaya yang dilakukan dengan membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Program SLRT merupakan program yang dijalankan sejak tahun 2016. Tujuan dari program ini adalah untuk menjembatani masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan yang dibutuhkan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016). Program ini menjangkau ke setiap desa. Masyarakat yang membutuhkan akan dicatat dalam Basis Data Terpadu oleh seorang fasilitator. Fasilitator merupakan seseorang yang mencatat setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Setiap desa akan terdapat fasilitator. Pencatatan ke dalam Basis Data Terpadu ini agar bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran.

Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) secara langsung dibentuk oleh Kementerian Sosial. Salah satu desa yang menerapkan program ini

berada di Desa Jengglunharjo. Program ini senantiasa berupaya mengurangi angka kemiskinan. Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu ini memiliki seorang manajer yang bertugas mengkoordinasi pelaksanaan SLRT, Front Office yang akan memberikan informasi kepada masyarakat yang datang ke sekretariat, Back Office yang menerima keluhan masyarakat, Fasilitator yang akan mencari data masyarakat miskin ke setiap desa dan Supervisor yang akan memantau fasilitator.

## **PEMBAHASAN**

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu merupakan program dari pemerintah. Tujuan dibentuknya program ini adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Program ini yang akan menjembatani masyarakat miskin untuk menerima bantuan dari pemerintah. Banyak masyarakat miskin yang sulit memperoleh bantuan dari pemerintah. Hal tersebut karena banyak bantuan yang diberikan secara tidak tepat sasaran. Sehingga memunculkan pro dan kontra diantara masyarakat dan pemberi bantuan. Masyarakat miskin biasanya akan mendapatkan bantuan melalui pemerintah. Adanya program SLRT tersebut untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan. Masyarakat miskin akan dicatat untuk diusulkan ke pusat.

Selanjutnya pusat akan memilah data-data masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu telah menjangkau ke desa-desa. Desa Jengglunharjo yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu yang terdapat Program tersebut. Program SLRT berada dinaungan Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung. Untuk di wilayah desa program tersebut dibantu oleh seorang fasilitator. Fasilitator bertugas mencari data-data masyarakat yang membutuhkan (Sa'idah and Prabawati, 2019). Fasilitator akan mencatat di Basis Data Terpadu. Data tersebut akan diperbaharui setiap 6 bulan sekali.

Menurut hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan, terbentuknya Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dari pemerintah tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat awalnya hanya mengetahui tentang bantuan apa saja yang diberikan. Namun mereka tidak mengetahui program apa yang mencatat bantuan yang dibutuhkan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang bantuan yang diharapkan tetapi tidak kunjung ada. Masyarakat biasanya akan menerima secara langsung bantuan tersebut melalui perangkat desa. Masyarakat miskin yang membutuhkan akan dicatat melalui perantara fasilitator. Adanya program

tersebut untuk memudahkan masyarakat miskin untuk tercatat dalam penerima bantuan. Masih saja ditemui masyarakat yang mampu tetapi masih berkeinginan untuk mendapatkan bantuan. Mereka merasa berhak untuk memperoleh bantuan. Selain itu terdapat masyarakat yang merasa iri dengan tetangganya karena menerima bantuan secara turun temurun. Maksudnya bahwa ketika orang tuanya sudah meninggal, bantuan tersebut tetap diberikan melalui anaknya. Masyarakat tersebut merasa bahwa itu sudah bukan menjadi hak orang tersebut. mereka merasa bahwa seharusnya bantuan tersebut bisa diberikan kepada masyarakat yang lainnya juga.

### **Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Dalam Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu**

Kondisi sosial ekonomi yang dimaksud dalam hal ini yaitu pendidikan, pekerjaan dan pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Adanya penjelasan mengenai kondisi sosial ekonomi dapat menggambarkan tentang status sosial ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di Desa Jengglunharjo. Adanya stratifikasi kelas yang akan membuat pembeda dalam suatu masyarakat ke dalam suatu kelas secara bertingkat sesuai dengan kekuasaan, privilese dan prestise (Maunah, 2015). Hasil penelitian yang telah dilakukan di

Desa Jengglunharjo bahwa mayoritas masyarakat di daerah tersebut bekerja sebagai petani dan buruh tani. Jumlah penduduk yang ada di desa tersebut yaitu 5261 jiwa pada tahun 2020. Desa Jengglunharjo terbagi menjadi 5 dusun yaitu Dusun Jengglung, Dusun Klumpit, Dusun Plandaan, Dusun Sumber dan Dusun Ngelo. Desa jengglunharjo terletak di sekitar daerah pegunungan. Akses untuk menuju desa tersebut harus naik turun dan melalui jalan berbelok-belok.

Tabel 2 Mata Pencaharian di Desa Jengglunharjo

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	1577
2	Pertambangan/Penggalan	2
3	Industri Pengolahan	14
4	Konstruksi/Bangunan	31
5	Perdagangan, Hotel & Restoran	96
6	Angka & Komunikasi	25
7	Keuangan & Persewaan	6
8	Sektor Jasa	34
9	Lainnya	33

Sumber: (Ansuistia, 2019)

Mayoritas pekerjaan masyarakat di Desa Jengglunharjo adalah sebagai petani atau buruh tani. Terlihat dalam tabel bahwa mata pencaharian sebagai petani jumlahnya cukup banyak yaitu mencapai

1577 jiwa dibanding pekerjaan yang lainnya. Pekerjaan menjadi petani atau buruh tani banyak dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut. Pada waktu masyarakat yang bekerja sebagai petani banyak yang bertanam jagung. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan pengetahuan dan mencari informasi. Rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi pekerjaan dan pendapatan yang akan diterima. Seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah akan sulit untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam mencapai yang diinginkan. Adanya beberapa jumlah masyarakat miskin yang berada di desa Jengglunharjo diakibatkan karena memiliki pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk berkembang. Adanya Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu akan senantiasa menjadikan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sulitnya memperoleh pekerjaan juga dirasakan oleh beberapa masyarakat. Jauhnya jarak yang ditempuh untuk menuju kota merupakan faktor yang mempengaruhi sulitnya mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. lapangan pekerjaan yang disediakan juga masih terbatas sehingga juga mempengaruhi masyarakat untuk sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Pekerjaan yang

dijalankan di Desa Jengglunharjo adalah sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani. Masyarakat tersebut menanam jagung, umbi-umbian yang mana hasil panen yang didapatkan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu sebagian masyarakat juga memelihara ternak seperti sapi dan kambing. Masyarakat biasanya bekerja di ladang selama 5-7 jam per hari. Masyarakat yang memiliki ternak biasanya akan mencari makan rumput di ladang atau semak-semak yang banyak terdapat rumput. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa penghasilan yang mereka dapatkan merupakan hasil dari menjadi buruh tani. Penghasilan rata-rata yang didapatkan dalam sebulan oleh masyarakat yaitu kurang lebih Rp 500.000. Hasil tersebut yang mereka pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

### **Pengetahuan masyarakat miskin mengenai program Sistem layanan Rujukan Terpadu**

Menurut hasil penelitian yang dilakukan bahwa masyarakat di desa Jengglunharjo sebagian telah mengetahui tentang program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang telah dibentuk oleh Kementerian Sosial. Pengetahuan tentang program tersebut didapatkan ketika mendapatkan bantuan yang diinginkan. Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu ini akan mencatat masyarakat yang membutuhkan yang dilakukan oleh

fasilitator desa tersebut. hal tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam mengenal program dari pemerintah yang mencatat bantuan. Dalam pelaksanaannya di desa-desa, program SLRT ini akan terus mencatat dan memperbaharui jumlah masyarakat miskin setiap 6 bulan sekali (Sa'idah and Prabawati, 2019). Masyarakat miskin akan bisa senantiasa tercatat dalam Basis Data Terpadu.

Masyarakat yang berada di Desa Jengglunharjo sebagian telah merasakan tentang adanya program tersebut. Masyarakat miskin yang awalnya tidak memperoleh bantuan, pada akhirnya bisa mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Bantuan-bantuan yang dicatat oleh program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu ini seperti KIS, PKH, KIP dan BPNT. Program SLRT ini mencakup semua bantuan tersebut yang dicatat dalam BDT oleh setiap fasilitator. Masyarakat yang tercatat dalam Basis Data Terpadu ini memang benar dari masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan tersebut memang berada dalam keadaan kurang mampu. Rumah yang ditempati masih berlantai semen dan tanah. Adanya Program Sistem dan Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) ini memudahkan masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan bantuan. Pengalaman dari masyarakat penerima bantuan dari pemerintah ini sangat

beruntung karena bisa tepat sasaran. Awalnya dahulu bantuan belum tepat sasaran dan sekarang bantuan telah diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan. Hal tersebut sangat dirasakan oleh beberapa masyarakat yang berada di desa tersebut.

Berbeda halnya dengan yang dirasakan oleh masyarakat yang awalnya mendapatkan bantuan tetapi sekarang sudah tidak bisa. Masyarakat yang sudah tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut berasal dari keluarga yang tergolong mampu. Adanya program yang mencatat tentang masyarakat miskin ini bisa membantu masyarakat yang benar membutuhkan bantuan dari pemerintah. Awalnya bantuan yang ada bisa diterima oleh semua orang termasuk orang yang mampu, namun saat ini bantuan tersebut bisa tersalurkan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Hal tersebut sering menjadi bahan obrolan oleh masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Mereka menganggap bahwa bantuan dari pemerintah tersebut juga bisa diperuntukkan untuk semua masyarakat.

Pengetahuan tentang adanya Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu ini semakin mempermudah fasilitator desa untuk mencatat setiap keluhan yang dirasakan masyarakat miskin. Fasilitator yang ada di desa juga akan semakin mudah untuk memasukkan

data ke dalam Basis Data Terpadu yang diusulkan ke pemerintah pusat. Masyarakat yang dicatat tidak semua bisa menerima bantuan tersebut. Masyarakat yang diusulkan harus bersabar dan menerima keputusan dari pemerintah pusat mengenai bantuan tersebut. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu ini fungsinya untuk mencatat dan mengusulkan ke pusat (Desi Purnamawati, 2020). Adanya program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan agar tepat sasaran. Bantuan yang diberikan tidak semua bisa menerima sehingga masih banyak keluhan dari masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan. Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu ini juga belum diketahui oleh sebagian masyarakat yang ada di Desa Jengglunharjo. Terlihat ketika dilakukan penelitian bahwa masyarakat tersebut tidak pernah mendengar program tersebut. Masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya program tersebut biasanya hanya mengetahui tentang bantuan yang diterima. Masyarakat tersebut tidak mengetahui tentang program tersebut karena merupakan program dari pemerintah yang masih baru dan kurangnya informasi mengenai hal tersebut. Belum mengetahuinya beberapa masyarakat tentang program tersebut bisa karena kurangnya informasi dan

pemberian sosialisasi yang kurang menyeluruh kepada setiap masyarakat.

Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu telah membantu untuk mencatat masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan. Beberapa masyarakat sudah mengetahui tentang program tersebut dan sebagian belum mengetahui tentang adanya program yang mempermudah pencatatan tersebut. Namun di sisi lain masih terdapat juga mengenai keluhan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dan bantuan yang didapatkan sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Beberapa masyarakat mengeluhkan mengenai Kartu Indonesia Sehat yang dimiliki sudah tidak bisa digunakan dan tidak lagi ditanggung oleh pemerintah. Masyarakat yang tidak mengetahui tentang hal tersebut akan diam dan menunggu keputusan dari pihak yang memberikan bantuan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan akan mengadukan kepada pihak desa dan hanya beberapa masyarakat saja yang mengadukan ke pihak desa. Beberapa masyarakat yang membutuhkan bantuan akan diam dan menunggu bantuan datang.

### **Proses Penerimaan Data Masyarakat Miskin Dalam Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu**

Pencarian data-data masyarakat miskin yang membutuhkan dilakukan secara valid oleh fasilitator yang mendampingi desa tersebut. Proses

pembaharuan juga akan dilakukan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan petunjuk dari pemerintah. Fasilitator akan sering ke desa untuk mencari data masyarakat miskin melalui operator desa ataupun mencari sendiri data masyarakat. Fasilitator desa Jengglungharjo akan mencari data ke desa tersebut dan akan membutuhkan waktu yang cukup lama agar data yang diperoleh benar-benar valid. Masyarakat miskin akan tercatat ke dalam Basis Data Terpadu apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut meliputi masyarakat miskin yang berada dalam status sosial ekonomi dibawah 40% yang dilihat berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan kelompok dari penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar serta masyarakat dari adat yang terpencil (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016). Masyarakat akan dicatat dalam Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu apabila masuk ke dalam kategori tersebut. Fasilitator dari program tersebut juga bekerjasama dengan anggota desa setempat untuk mencari data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Untuk data di Desa Jengglungharjo tersebut telah tercatat sebanyak 2705 jiwa yang telah diusulkan ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat nantinya yang berhak untuk menentukan berapa masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Data yang sudah

dicatat akan dilihat kembali oleh pusat sebagai acuan dalam penentuan pemberian bantuan.

Proses pencarian data masyarakat miskin membutuhkan waktu yang cukup lama. Pencarian data selalu dilakukan oleh fasilitator untuk mencari data yang benar-benar valid dan memperbaharui data masyarakat miskin yang lama. Fasilitator desa juga bekerjasama dengan perangkat desa untuk mencari data masyarakat miskin. Adanya kerjasama antara fasilitator dan perangkat desa akan memudahkan untuk menemukan masyarakat miskin yang berhak dicatat dalam data Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Data-data yang telah ada nantinya akan disetorkan ke sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang berada di Kabupaten. Pencarian data masyarakat miskin ini tidak mudah. Fasilitator harus teliti dalam memasukkan data masyarakat miskin. Masyarakat yang dimasukkan harus benar valid datanya. Ketika memasukkan data di Basis Data Terpadu ada banyak hal yang harus dimasukkan. Hal-hal yang dimaksud seperti luas tanah yang ditempati, alas yang ada dirumah, jumlah anggota keluarga, kamar mandi sudah ada atau belum, jumlah penghasilan, pekerjaan kepemilikan aset (Achmaliadi *et al.*, 2007). Pemasukkan data tersebut supaya masyarakat yang diusulkan benar adanya

dari keluarga miskin yang tidak mampu. Proses penerimaan dengan melalui program ini sangat ketat. Masyarakat yang tergolong miskin akan selalu diusulkan ke pusat jika belum ada perubahan dalam hidup masyarakat tersebut. Jika masyarakat yang telah diusulkan tersebut telah mengalami perubahan hidup maka akan ada pembaharuan data ke dalam Basis Data Terpadu.

Masyarakat miskin yang mengalami perubahan hidup yang lebih baik tidak akan bisa mendapatkan bantuan lagi. Adanya hal tersebut terkadang membuat masyarakat tersebut merasa kesal dan menyalahkan pihak terkait. Masyarakat tersebut tidak mau menerima jika sudah tidak bisa mendapatkan bantuan lagi. Sebagai contohnya ketika dahulu masyarakat tersebut hidup dalam keadaan miskin dan memiliki pendapatan yang dibawah rata-rata. Masyarakat miskin tersebut masih bisa diusulkan dan memiliki kesempatan untuk terus mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ketika masyarakat miskin tersebut sudah memiliki pekerjaan dan pendapatan yang dimiliki tidak dibawah standar lagi dan sudah memiliki rumah yang tergolong bagus, maka masyarakat tersebut tidak bisa diusulkan lagi ke pusat. Sehingga hal tersebut akan ada pembaharuan data yang dilakukan oleh fasilitator desa. Tugas dari fasilitator desa ini untuk mencari dan



memperbaharui data-data masyarakat miskin yang ada di desa. Pencatatan masyarakat yang membutuhkan yang berada di desa juga akan dibantu oleh seorang operator desa. Operator desa akan membantu fasilitator yang mendampingi desa untuk mencatat masyarakat miskin yang layak diusulkan. Operator tersebut berasal dari anggota yang bekerja di desa setempat. Fasilitator di setiap desa akan selalu berkomunikasi dengan pihak desa dan operator desa mengenai usulan masyarakat yang membutuhkan. Adanya kerjasama antara fasilitator Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu akan mempercepat proses penerimaan data untuk dicatat dan selanjutnya diusulkan ke pemerintah.

### **Proses Habitulasi Masyarakat**

Kehidupan sosial yang dijalani oleh masyarakat tidak terlepas dari adanya suatu praktik sosial. Hal tersebut akan terlihat pada background yang dimiliki seseorang yang dapat mencerminkan mengenai kebiasaan yang dilakukan setiap harinya (Harker, 2005). Adanya suatu kebiasaan yang berupa gaya hidup, perilaku dan nilai yang akan mengetahui tentang habitus yang dimiliki oleh seseorang. Penelitian yang telah dilakukan di Desa Jengglunharjo tersebut terlihat bahwa masyarakat telah menggunakan bantuan yang diberikan. Kebiasaan masyarakat pada umumnya adalah

menunggu bantuan yang ada. Selanjutnya masyarakat akan menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan yang dianggap penting. Seperti yang dikatakan oleh Bourdieu bahwa habitus digunakan untuk menghadapi kehidupan sosial (Harker, 2005). Sehingga sebuah kebiasaan yang telah dilakukan akan dilakukan kembali secara terus menerus. Habitus yang ada di masyarakat akan tergantung pada posisi seorang individu dalam lingkungannya.

Masyarakat dalam hal ini akan berusaha untuk bisa mendapatkan bantuan dari tahun ke tahun. Hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan yang ada dalam pikiran masyarakat tersebut. Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) akan senantiasa menjembatani masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi angka kemiskinan. Habitus masyarakat dengan adanya program tersebut adalah berusaha untuk bisa tercatat dalam Basis Data Terpadu (Muhtar, 2017). Tidak semua masyarakat bisa tercatat dalam program tersebut untuk mendapatkan bantuan. Disisi lain ada beberapa masyarakat yang terlihat mampu tetapi masih berupaya untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal tersebut juga merupakan salah satu kebiasaan dari masyarakat yang terkadang memiliki rasa iri kepada individu lainnya. Masyarakat yang tidak tercatat untuk mendapatkan bantuan biasanya akan

mendatangi Balai Desa untuk menanyakan mengenai pencatatan bantuan tersebut.

Habitus akan terus berjalan ketika orang-orang tetap terus akan belajar sehingga memperoleh ilmu pengetahuan yang merupakan modal dalam suatu lingkungannya. Modal ilmu pengetahuan tersebut selanjutnya akan dibawa ke dalam suatu ranah atau kelas sosial dan memunculkan suatu persaingan. Bourdieu menjelaskan tentang modal yang meliputi modal sosial, modal ekonomi, modal budaya serta modal simbolik. Kaitannya dengan penelitian ini bahwa modal-modal tersebut akan menentukan seseorang dalam lingkungannya. Seseorang yang memiliki pekerjaan tinggi dan pendapatan yang besar akan bisa mempergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Berbeda halnya dengan seseorang yang bekerja tetapi memiliki penghasilan kecil. Individu tersebut akan kesulitan dalam hal memenuhi hidupnya. Hal tersebut juga langsung berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. pengetahuan bisa didapatkan melalui pendidikan yang tinggi. Seseorang yang memiliki pendidikan tinggi akan disegani oleh orang lain dan dihormati dalam lingkungannya. Hubungan yang terjalin antar sesama individu juga telah terbentuk sejak individu tinggal dalam satu lingkungan yang sama.

Masyarakat yang telah tinggal dalam satu lingkungan yang sama sejak lahir akan mengetahui kebiasaan dan karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu. Kebiasaan yang dimiliki setiap individu akan berbeda-beda. Masyarakat akan saling mengerti dan memahami tentang perbedaan yang ada. Sebagian masyarakat juga akan menggolongkan seseorang dalam kepemilikan kekuasaan dalam lingkungannya. Seperti halnya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. Bantuan tersebut dikhususkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat miskin yang telah peneliti wawancara mengatakan bahwa mereka biasanya hanya menunggu untuk bantuan tersebut cair atau dapat diterima. Para masyarakat miskin tersebut juga tidak akan mempermasalahkan siapa yang dapat atau tidak. Menurut beberapa masyarakat miskin mengatakan bahwa mereka tidak apa-apa tidak menerima bantuan daripada harus berurusan dengan pihak desa. Adanya Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) menurut masyarakat miskin tersebut sudah cukup membantu. Bantuan akan diterima oleh masyarakat miskin tersebut dan bisa mengatasi masalah yang ada. Masyarakat miskin yang ada terkadang juga tidak mau untuk mengurus keperluan yang dibutuhkan. Mereka biasanya hanya menunggu untuk mendapatkan bantuan.

Ada beberapa masyarakat miskin dimana bantuan yang dimiliki sudah tidak dapat digunakan. Ketika ditanya masyarakat tersebut mengatakan jika belum pernah menanyakan hal tersebut ke pihak desa setempat. Hal tersebut sering dilakukan oleh beberapa masyarakat karena sudah menjadi sebuah habitus yang melekat pada diri seorang individu. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut telah terjadi sejak lama dan masih saja terus dilakukan. Habitus inilah yang terus melekat dan telah menciptakan praktik baru dalam lingkungannya. Mereka secara tidak langsung memberikan contoh kepada masyarakat lain dan juga kepada anggota keluarganya. Habitus inilah yang terjadi secara lama dan dilakukan secara berulang oleh setiap masyarakat.

Masyarakat biasa yang tidak masuk ke dalam Basis Data Terpadu dalam SLRT juga memiliki rasa iri kepada masyarakat miskin yang menerima bantuan. Hal tersebut dikatakan oleh beberapa masyarakat di desa tersebut. Mereka menganggap bahwa mereka sebenarnya juga berhak mendapatkan bantuan. Mereka juga memerlukan bantuan tersebut untuk menyambung hidup. Masyarakat tersebut tetapi tidak mau untuk menemui pihak desa untuk bisa diusulkan. Mereka menganggap bahwa nanti mengusulkan ke desa maka tidak akan ditanggapi. Sehingga dari dahulu sampai sekarang mereka hanya

bisa diam. Masyarakat tersebut juga mengatakan bahwa jika ada masyarakat yang menerima bantuan tetapi sudah meninggal, tetapi sampai sekarang bantuan tersebut tetap berjalan. Mereka beranggapan bahwa pihak desa tidak bisa adil dalam memberikan bantuan. Menurut mereka seharusnya jika sudah meninggal harus diberikan kepada masyarakat miskin yang lain. Hal tersebut menjadi pemicu terjadinya hal-hal yang tidak benar yang menyangkut bantuan yang diberikan dari pemerintah. Kebiasaan masyarakat yang seperti itu juga dipicu oleh faktor-faktor yang melatarbelakngai. Adanya bantuan dari pihak-pihak tertentu serta jaringan sosial yang ada juga memunculkan bantuan yang diberikan tidak sesuai. Namun hal tersebut dikatakan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan bantuan karena mereka merasa memiliki kehidupan yang kurang.

Masyarakat yang memiliki kartu yang merupakan bantuan dari pemerintah pada dasarnya berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan tentang kartu yang mereka gunakan tidak bisa digunakan dan tidak pernah lagi menerima bantuan. Masyarakat yang tidak bisa menggunakan bantuan yang diterima karena masyarakat tersebut sudah memiliki perubahan dalam hidupnya. Sehingga masyarakat tersebut sudah tidak lagi mendapatkan bantuan dari

pemerintah. Adanya Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu ini yang mencatat dan memperbaharui data-data masyarakat setiap 6 bulan sekali. Namun kurangnya informasi yang diterima oleh beberapa masyarakat yang justru menimbulkan pikiran yang buruk terhadap pemerintah setempat. Masyarakat yang beranggapan bahwa pihak desa pilih kasih untuk memberi bantuan adalah masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu.

Sebuah habitus muncul ketika seorang individu melakukan sesuatu secara berulang ulang (Siregar, 2016). Habitus yang ada juga bisa mempengaruhi individu lainnya untuk melakukan sesuatu yang sama. Masyarakat dalam suatu lingkungannya juga melakukan sebuah kebiasaan yang akan mempengaruhi orang lain. Seperti halnya masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka masyarakat tersebut akan menggunkan bantuan dengan sebaik mungkin. Hal tersebut akan dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang karena merupakan sebuah habitus yang akan melekat pada dirinya. Berbeda halnya dengan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan karena dianggap mampu. Mereka akan terus menyalahkan pihak tertentu karena mereka merasa berhak mendapatkan bantuan. Selain itu

mereka juga merasa iri kepada masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut akan secara terus menerus melakukan sesuatu yang sama ketika ada masyarakat miskin yang membutuhkan. Banyak masyarakat mampu yang juga ingin mendapatkan bantuan. Hal tersebut tidak bisa diberikan bantuan karena yang mencatat adalah pihak dari program SLRT dan yang berhak diusulkan untuk mendapatkan bantuan adalah yang sesuai dengan kriteria.

Habitus dijalankan pada sebuah ranah. Masyarakat menjalankan habitusnya dalam lingkungannya. Lingkungan yang menjadi tempat tinggal digunakan untuk mewujudkan dan menjalankan kebiasaan yang dimiliki (Sa'idah and Prabawati, 2019). Masyarakat miskin yang diusulkan dalam Program Sistem Layanan dan Rujukan dan Terpadu senantiasa menunggu bantuan tersebut cair setiap bulannya. Jika bantuan tersebut tidak cair maka masyarakat tersebut terus menyalahkan pemerintah. Pemerintah yang berhak menentukan penerima bantuan. Habitus masyarakat yang dijalankan pada sebuah ranah akan menghasilkan sebuah praktik dalam kehidupannya. Kebiasaan masyarakat pada dasarnya selalu menyalahkan pemerintah mengenai bantuan yang tidak merata dan tidka tepat sasaran. Terkadang masyarakat juga tidak

mengetahui tentang sulitnya pencarian data masyarakat miskin yang membutuhkan. Data yang ditemukan bahwa masyarakat yang telah tergolong mampu masih mempunyai kartu dari pemerintah tetapi biaya sudah tidak ditanggung oleh pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat. Masyarakat yang sudah tidak ditanggung oleh pemerintah merasa kesal dengan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Mereka mengira bahwa bantuan yang dimiliki masih bisa digunakan. Masyarakat yang dianggap mampu tersebut merasa bahwa masih membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Masyarakat terkadang merasa iri dengan masyarakat lainnya yang mendapatkan bantuan. Mereka juga berkeinginan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terdapat suatu pernyataan dari masyarakat yang ditemui bahwa terdapat masyarakat yang sudah meninggal dunia tetapi bantuan dari pemerintah tetap berjalan. Bantuan tersebut diberikan kepada anggota keluarga lainnya padahal yang bersangkutan sudah meninggal. Masyarakat itu merasa bahwa seharusnya bantuan itu bisa diberikan kepada masyarakat miskin lainnya yang berhak mendapatkan bantuan supaya bisa terdistribusi merata. Namun masyarakat yang merasa tidak terima tersebut tidak mau untuk menanyakan hal tersebut kepada pihak

terkait. Mereka tidak mau untuk menjelaskan karena bukan wewenangnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Habitus yang ditemukan dalam penerapan Program Sistem Layanan Rujukan dan Terpadu (SLRT) di Desa Jengglunharjo terdiri dari beberapa hal. Masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan akan dicatat dan disulkan ke pusat. Selanjutnya masyarakat akan menunggu bantuan tersebut cair. Banyak ditemui masyarakat yang sudah tidak bisa menggunakan bantuan yang dimiliki karena sudah buka merupakan tanggungan pemerintah. Masyarakat tersebut tidak mengetahui bahwa bantuan yang dimiliki tidak bisa digunakan. Mereka hanya bisa menunggu tentang adanya bantuan yang datang dan tidak pernah menanyakan kepada pihak terkait.

Masyarakat mampu sesuai dengan kriteria masih sering mengeluhkan tentang bantuan dari pemerintah. Mereka merasa berhak untuk mendapatkan bantuan. Namun mereka tidak pernah sama sekali untuk menanyakan dan meminta kepada yang mencatat pengusulan bantuan. Kurangnya informasi yang didapat mengenai sistem bantuan dari pemerintah yang terkadang masih menimbulkan pro dan kontra diantara sebagian masyarakat. Rasa iri terkadang juga muncul dari masyarakat yang tidak menerima bantuan.

Pengetahuan mengenai Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu diketahui oleh sebagian masyarakat. Masyarakat yang sudah mengetahui akan paham mengenai sistem pengusulan bantuan. Pengetahuan yang di dapat ini yang memudahkan masyarakat untuk sadar dan mau menerima setiap keputusan mengenai bantuan pemerintah. Tidak semua masyarakat miskin yang disulkan dapat menerima bantuan. Fasilitator desa yang mencatat data masyarakat miskin hanya bisa mengusulkan. Habitus masyarakat mengenai gaya hidup di lingkungannya akan terlihat ketika perilaku yang dimiliki muncul. Ketika modal yang dimiliki seseorang yaitu pengetahuan mengenai adanya program tersebut, maka masyarakat akan menerima setiap bantuan yang ada. Terkadang masih banyak masyarakat yang dikatakan mampu masih ingin menerima bantuan. Mereka tidak mau untuk menjelaskan kepada pihak terkait tetapi akan membicarakan hal tersebut kepada masyarakat yang lainnya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah diuraikan maka peneliti menyusun beberapa saran. Saran tersebut meliputi kepada anggota dari Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) harus berupaya meningkatkan kinerja yang dimiliki supaya masyarakat lebih mengetahui tentang program tersebut.

Untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan supaya tidak malu untuk menyampaikan keluhan yang dimiliki. Hal tersebut supaya bantuan dari pemerintah bisa diterima untuk masyarakat yang memang membutuhkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmaliadi, R. *et al.* (2007) *Memahami dimensi-dimensi kemiskinan masyarakat adat*. Edited by R. Achmaliadi and M. Shohibuddin. Yogyakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
- Ansuistia, A. (2019) *Kecamatan Tanggunggunung Dalam Angka Tanggunggunung Sub Regency in Figure 2019*. Edited by D. Suyono. Tulungagung: BPS Kabupaten Tulungagung.
- Badan Pusat Statistik (2020) *Presentase Penduduk Miskin*. Jakarta.
- Chambers, R. (1983) *Rural Development, Putting the Last First*, Longman. London: Longman.
- Darwis, V. and Nurmanaf, A. R. (2001) 'Pengentasan Kemiskinan: Upaya Yang Telah Dilakukan Dan Rencana Waktu Mendatang', 19.
- Desi Purnamawati (2020) *SLRT dan Pusat Kesejahteraan Sosial Siap Layani Keluhan Masyarakat*. Jakarta.
- Djafar, R. and Sune, U. (2019) 'Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pohuwato', *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 11.

Girsang, W. (2011) *Kemiskinan Multidimensial di Pulau-Pulau Kecil*, Badan Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Pattimura.

Harker, R. (2005) (*Habitus X Modal*) + *Ranah = Praktik*. Yogyakarta: JALASUTRA.

Kementerian Sosial Republik Indonesia (2016) *Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan terpadu untuk perlindungan Sosial dan penanggulangan Kemiskinan*, IOSR *Journal of Economics and Finance*. Jakarta.

Khomsan, A. *et al.* (2015) *Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Fakultas Ekologi Manusia IPB.

Marleni, M. (2012) 'Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan: Studi Kabupaten Solok Pasca Keluarnya UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah', *Jurnal Pelangi*, 5.

Maunah, B. (2015) 'Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan', *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), pp. 19–38. doi: 10.21274/taalum.2015.3.1.19-38.

Muhtar, M. (2017) 'Peningkatan Layanan Sosial Bagi Keluarga Miskin

Terhadap Program Perlindungan Sosial Melalui Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu', *Sosio Informa*, 3(1), pp. 59–69. doi: 10.33007/inf.v3i1.378.

Ritzer, G. and Douglas J. Goodman (2008) *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.

Sa'idah, Z. and Prabawati, I. (2019) 'Implementasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto', *Foreign Affairs*, 91(5), pp. 1689–1699.

Sadewo, F. *et al.* (2007) *Masalah-Masalah Kemiskinan*. Surabaya: Unesa University Press.

Siregar, M. (2016) 'Teori :Gado-Gad0" Pierre-Felix Bourdieu', I(2), pp. 79–82.

Suryawati, C. (2005) 'Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional', *JMPK*, 08.

Suyanto, B. and Sutinah (2004) *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.